



RENCANA KERJA TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, berpedoman pada :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 2021-2026

Bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

Bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

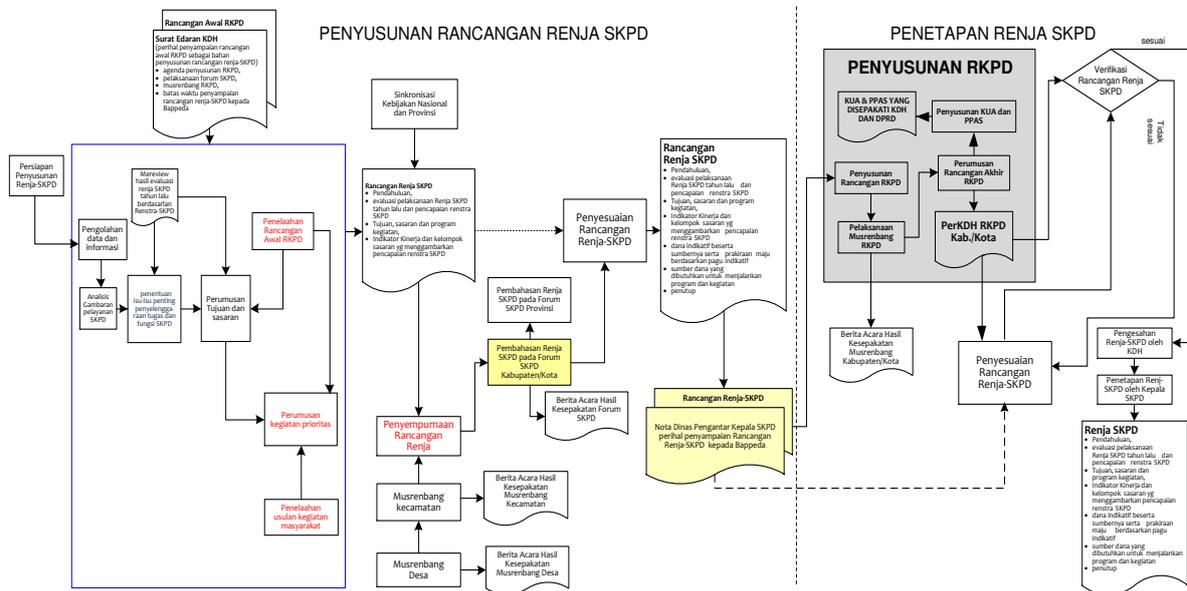
- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;

- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan;
- f. Penetapan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

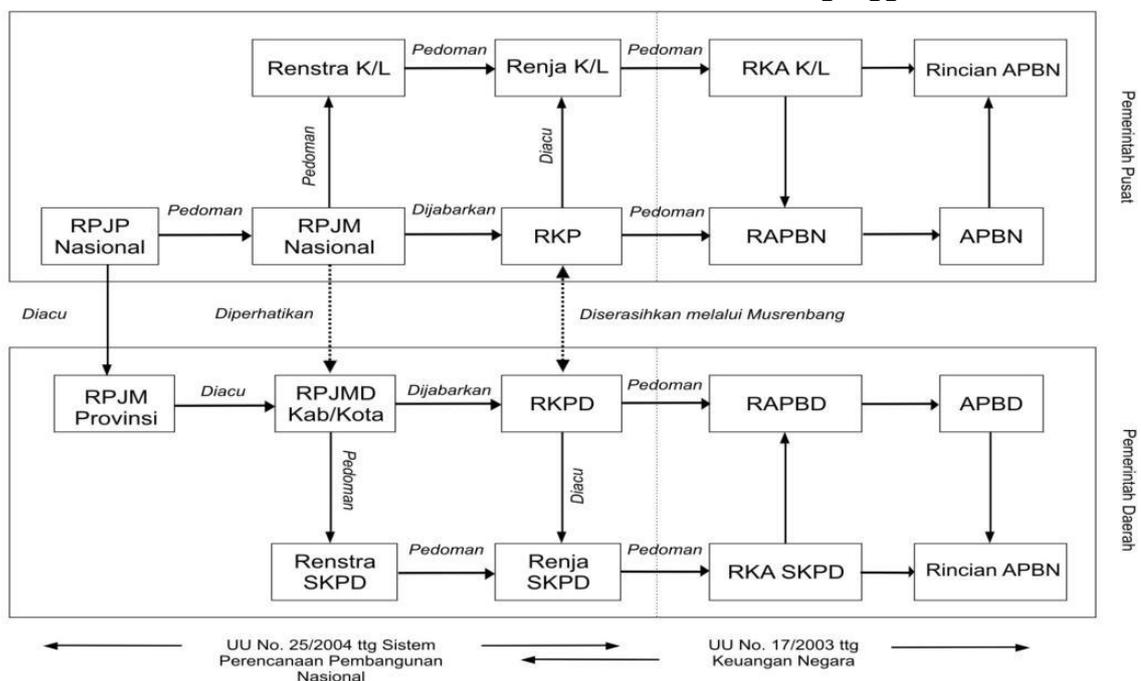
Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Kerja PD



I.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya periode 2021 – 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Jawa Timur. Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



I.2 Landasan Hukum

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya , diatur berdasarkan :

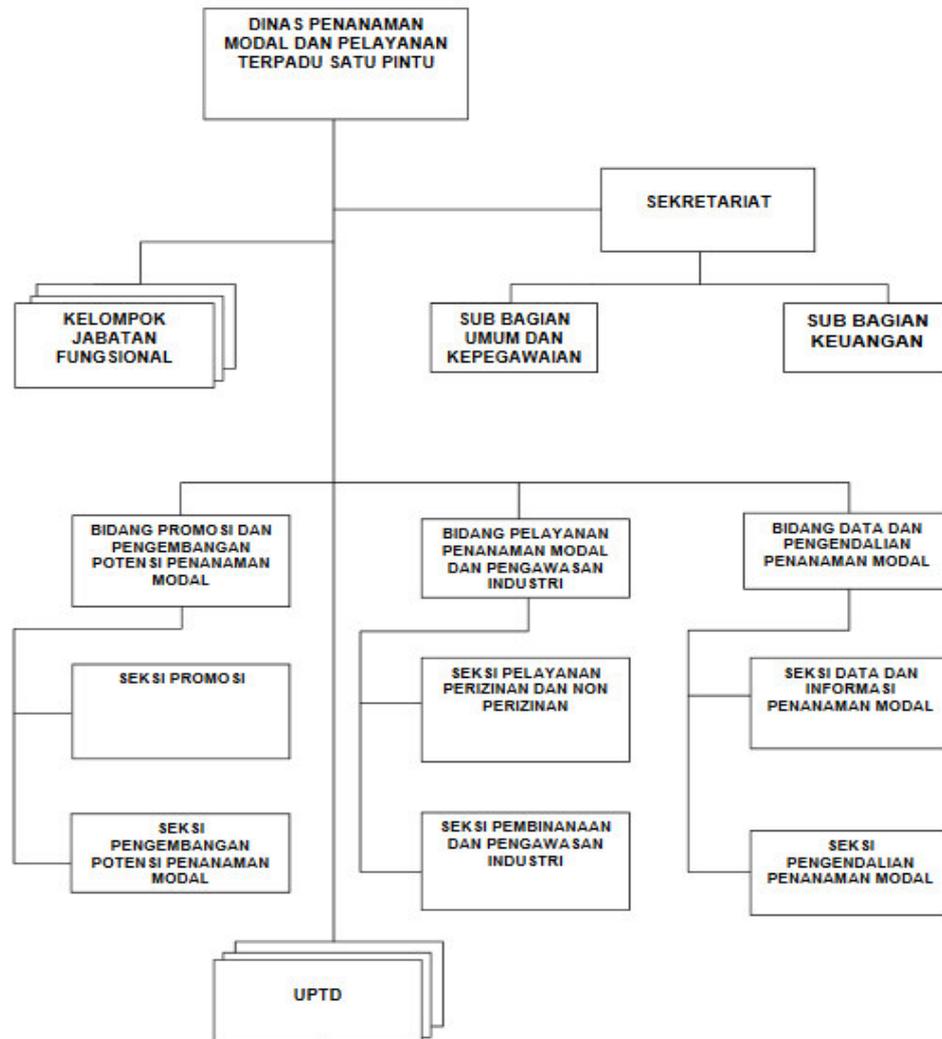
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 1.3
Bagan Organisasi Perangkat Daerah



I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut:

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga urusan penanaman modal tidak memerlukan standart pelayanan minimal.

I.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

I.2.5 Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG's.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

I.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).

- b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

I.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah dan ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2019.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pokok bahasan ini disusun sebagai hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang didalamnya dijelaskan mengenai tingkat kinerja Perangkat Daerah, hal-hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepada daerah, capaian program nasional serta berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, juga isu-isu penting/ strategis dalam pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Dalam penutup Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja 2022 serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Evaluasi Renja Tahun 2019

Hasil evaluasi Renja Tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 98.81% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 98.81%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Temu Usaha Fasilitas Pendukung Logistik
Dengan indikator Jumlah temu usaha fasilitas pendukung logistik yang dilaksanakan, dari target 1 kali terealisasi 1 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- b. Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal
Dengan indikator Jumlah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan, dari target 1 kali telah terealisasi 1 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- c. Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya
Dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang dipetakan, dari target 500 perusahaan telah terealisasi 500 perusahaan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- d. Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal.
Dengan indikator Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi, dari target 2800 perusahaan telah terealisasi 2800 perusahaan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- e. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal.
Dengan indikator Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan, dari target 12 kali telah terealisasi 12 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- f. Pendampingan PMA dan PMDN
Dengan indikator Jumlah PMA dan PMDN yang didampingi, dari target 400 lembaga telah terealisasi 400 lembaga sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- g. Penyelenggaraan Promosi Investasi
Dengan indikator Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan, dari target 3 kali telah terealisasi 3 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- h. Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya.

Dengan indikator Jumlah dokumen Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun, dari target 3 dokumen telah terealisasi 3 dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.

i. Bimtek Penyusunan Informasi Industri.

Dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek informasi industri, dari target 300 orang telah terealisasi 300 orang sehingga persentase capaian sebesar 100%.

j. Bimtek Perizinan Penanaman Modal.

Dengan indikator Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek perizinan penanam modal, dari target 100 lembaga telah terealisasi 100 lembaga sehingga persentase capaian sebesar 100%.

k. Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu.

Dengan indikator Jumlah peserta pembinaan layanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dibina, dari target 100 orang telah terealisasi 100 orang sehingga persentase capaian sebesar 100%.

l. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan tanda daftar perusahaan, dari target 550 pelaku usaha telah terealisasi 550 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 100%.

m. Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu.

Dengan indikator Jumlah koordinasi teknis pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu yang dilaksanakan, dari target 24 kali telah terealisasi sebanyak 24 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

n. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dengan indikator Jumlah kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau, dari target 2 kali telah terealisasi sebanyak 2 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

o. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT).

Dengan indikator Jumlah penyampaian informasi yang dilakukan, dari target 4 kali telah terealisasi sebanyak 4 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- p. Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan / Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok.

Dengan indikator pendataan dan Pengawasan mesin pelinting rokok yang dilaksanakan, dari target 1 kali telah terealisasi sebanyak 1 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- q. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Dengan indikator Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran. dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- r. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana,

Dengan indikator Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. dari target 100% telah terealisasi sebanyak 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- b. Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistic

Dengan indikator Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik.

Dari target 30% telah terealisasi 200% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 666.67%

Realisasi sebesar 200% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

[Jumlah investasi fasilitas pendukung logistik (t) - Jumlah investasi fasilitas pendukung logistik (t0) / Jumlah investasi fasilitas pendukung logistik (t0)] x 100%

$$= \frac{6 - 2}{2} \times 100\%$$
$$= 200\%$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2016.
- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2017.
- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2018.
- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2019.
- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2016 sebanyak 2 perusahaan
- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebanyak 3 perusahaan
- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2018 sebanyak 1 perusahaan
- * Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2019 sebanyak 6 perusahaan

c. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan 2 indikator :

1. Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi.

Dari target 16% telah terealisasi 27.89% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 174.30%.

Realisasi sebesar 27.89% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{[\text{jumlah realisasi proyek investasi (t)} - \text{jumlah realisasi proyek investasi (t0)}]}{\text{jumlah realisasi proyek investasi (t0)}} \times 100\%$$

$$= \frac{((5547+11842) - (13.577+20))}{(13.577+20)} \times 100\%$$

$$(13.577+20)$$

$$= 27.89\%$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2015 sebanyak 20 proyek

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2015 sebanyak 13.577 proyek

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2017 sebanyak 15.479 proyek

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2018 sebanyak 16.275 proyek

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2019 sebanyak 11.842 proyek

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebanyak 44 proyek

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2018 sebanyak 122 proyek

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2019 sebanyak 5547 proyek

2. Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi.

Dari target 24% telah terealisasi 89.02% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 370.93%.

Realisasi sebesar 89.02% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{[\text{jumlah rencana proyek investasi (t)} - \text{jumlah rencana proyek investasi (t0)}]}{\text{jumlah rencana proyek investasi (t0)}} \times 100\%$$

$$= \frac{(155+0) - (0+82)}{(0+82)} \times 100\% \\ = 89.02\%$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- * Jumlah rencana proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2017 sebanyak 0
- * Jumlah rencana proyek investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebanyak 148 proyek
- * Jumlah rencana proyek investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2018 sebanyak 136 proyek
- * Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2019 sebanyak 155 proyek
- * Jumlah rencana proyek investasi pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2015 sebanyak 82 proyek
- * Jumlah rencana proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas tahun 2015-2019 sebanyak 0

d. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dari target 76% telah terealisasi 86.37% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 113.65%

Realisasi sebesar 86.37% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu}}{\text{Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan}} \times 100\%$$

$$= \frac{111827}{129468} \times 100\%$$
$$= 86.37\%$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- * Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan Tahun 2018 sebanyak 104.693
- * Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan Tahun 2019 sebanyak 129.468
- * Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu Tahun 2018 sebanyak 87.991
- * Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu Tahun 2019 sebanyak 111.827

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Dari Target 76% telah terealisasi sebesar 82.76% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 108.89%

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pembinaan PMA dan PMDN

Dengan indikator Jumlah PMA dan PMDN yang dibina, dari target 200 lembaga telah terealisasi 205 lembaga sehingga persentase capaian sebesar 102,50%.

b. Pengelolaan Data Investasi.

Dengan indikator Jumlah data investasi yang dikelola, dari target 34403 data telah terealisasi 41400 data sehingga persentase capaian sebesar 120.34%.

c. Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu.

Dengan indikator Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan, dari target 90000 berkas telah terealisasi 117456 berkas sehingga persentase capaian sebesar 130,51%.

d. Pengawasan Perijinan Industri dan Tanda Daftar Perusahaan.

Dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin industri dan

tanda daftar perusahaan yang diawasi, dari target 10300 orang telah terealisasi sebanyak 10315 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 100,15%.

b. **Evaluasi Renja Tahun 2020**

Hasil evaluasi Renja Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 99,93% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 99,93%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Promosi Investasi

Dengan indikator Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan, dari target 2 kali telah terealisasi 2 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

b. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dengan indikator Jumlah kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau, dari target 2 kali telah terealisasi sebanyak 2 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- c. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT).

Dengan indikator Jumlah penyampaian informasi yang dilakukan, dari target 4 kali telah terealisasi sebanyak 4 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- d. Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan / Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok.

Dengan indikator pendataan dan Pengawasan mesin pelinting rokok yang dilaksanakan, dari target 1 kali telah terealisasi sebanyak 1 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Dengan indikator Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran. dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- f. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana,

Dengan indikator Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. dari target 100% telah terealisasi sebanyak 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal dengan indikator Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM

Dari target 40% telah terealisasi 42,21% sehingga persentase capaian

kinerja sebesar 105,54%.

Realisasi sebesar 42,21% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

= (jumlah perusahaan penanaman modal yang menyusun dan menyampaikan LKPM sampai dengan 2020 / jumlah perusahaan penanaman modal yang berizin dan dibina sampai dengan 2020) * 100

= (244/578) *100

= 42.21%

Raw data yang digunakan dalam melakukan perhitungan

- Jumlah perusahaan penanaman modal yang menyusun dan menyampaikan LKPM sampai dengan 2020
- Jumlah perusahaan penanaman modal yang berizin dan dibina sampai dengan 2020

b. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

dengan indikator Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi.

Dari target 20% telah terealisasi 24,90% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 124,51%.

Realisasi sebesar 24,90% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{[\text{jumlah realisasi proyek investasi (t)} - \text{jumlah realisasi proyek investasi (t0)}] \times 100\%}{\text{jumlah realisasi proyek investasi (t0)}}$$

= $\frac{((588+16395) - (20+13577))}{(20+13577)} \times 100\%$

= 24,90%

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas Tahun 2015 sebanyak 13.577.
- Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas Tahun

2020 sebanyak 16.395

- Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2015 sebanyak 20 proyek.
- Jumlah realisasi proyek pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 sebanyak 588 proyek.

Adapun data pendukung terkait dengan capaian Tujuan, Sasaran dan Program dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.10
Jumlah Ijin PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas
Tahun 2015 s/d 2019

TAHUN	IZIN PMA	IZIN PMDN	TOTAL IZIN PMA DAN PMDN	IZIN PMDN NonFas (INVESTASI DAERAH)
2015	12	8	20	13.577
2016	43	16	59	14.754
2017	34	10	44	15.479
2018	109	12	121	16.274
2019	64	5,483	379	11.842
2020	122	466	588	16.395

- c. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkup Penanaman Modal
Dari target 78% telah terealisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 128,21%.

Realisasi sebesar 100% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai tepat waktu}}{\text{Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai}} \times 100\% \\ &= \frac{13317}{13317} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu tahun 2020 sebanyak 13.317 ijin.
- Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai tahun 2020 sebanyak 13.317 ijin.

dengan indikator Persentase industry / perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya.

Dari target 72% telah terealisasi 75,10% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,31%.

Realisasi sebesar 75,10% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah industri yang melakukan pelaporan sampai dengan tahun (t)}}{\text{Jumlah industri yang berizin dan dibina sampai dengan tahun (t)}} \times 100\% \\ &= \frac{564}{751} \times 100\% \\ &= 75,10\% \end{aligned}$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Jumlah industri dan perusahaan yang melakukan pelaporan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 564 perusahaan
- Jumlah industri dan perusahaan yang berizin dan dibina sampai dengan tahun 2020 sebanyak 751 perusahaan

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.

Dari target 87% telah terealisasi 88,12% sehingga persentase capaian

kinerja sebesar 101,29%.

Program tersebut didukung oleh kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.

3. Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dengan indikator Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi, dari target 2100 perusahaan telah terealisasi 2102 lembaga sehingga persentase capaian sebesar 100,10%.

b. Pengelolaan Data Investasi.

Dengan indikator Jumlah data investasi yang dikelola, dari target 41751 data telah terealisasi 44839 data sehingga persentase capaian sebesar 107,40%.

c. Pengembangan Potensi Penanaman Modal.

Dengan indikator Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal, dari target 8 dokumen telah terealisasi 9 dokumen sehingga persentase capaian sebesar 112,50%.

d. Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu.

Dengan indikator Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan, dari target 60000 berkas telah terealisasi 94367 berkas sehingga persentase capaian sebesar 157,28%.

e. Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP.

Dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi, dari target 11500 orang telah terealisasi sebanyak 12509 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 108,77%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan realisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- Faktor-faktor melebihi target kinerja program/kegiatan dikarenakan adanya jumlah perizinan yang bertambah sehingga banyaknya pemohon yang melakukan perizinan secara online maupun manual seperti :

1. Sistem online memudahkan masyarakat melakukan pengajuan permohonan perizinan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah :

- Tercapainya ketepatan waktu dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
- Meningkatkan pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik dan pertumbuhan ijin realisasi investasi
- Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana kantor dalam kondisi baik

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

- Meningkatkan pemberian informasi terkait kewajiban pengusaha.
- Perencanaan anggaran diharapkan lebih lebih efisien dan efektif.
- Meningkatkan kualitas pelayanan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel T-C.29

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan									
1.1	Wajib									
1.1.2	Non Pelayanan Dasar									
1.1.2.10	Penanaman Modal									
1.1.2.10.01	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal									
		<i>Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM</i>	-	40.00%	40.00%	42.21%	105.54%	42.00%	-	-
1.1.2.10.01.0001	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi</i>			2100 perusahaan	2102 perusahaan	100.10 %	-	-	-
1.1.2.10.01.0003	Pengelolaan Data Investasi	<i>Jumlah data investasi yang dikelola</i>			41751 data	44839 data	107.40 %	-	-	-
1.1.2.10.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi									
		<i>Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi</i>	-	20.00%	20.00%	24.90%	124.51%	24.00%	-	-
1.1.2.10.02.0001	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	<i>Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal</i>			8 dokumen	9 dokumen	112.50 %	-	-	-
1.1.2.10.02.0002	Penyelenggaraan Promosi Investasi	<i>Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan</i>			2 kali	2 kali	100.00 %	-	-	-
1.1.2.10.03	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal									
		<i>Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya</i>	-	72.00%	72.00%	75.10%	104.31%	75.00%	-	-
		<i>Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal</i>	-	78.00%	78.00%	100.00%	128.21%	80.00%	-	-
1.1.2.10.03.0004	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	<i>Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan</i>			2 kali	2 kali	100.00 %	-	-	-
1.1.2.10.03.0005	Pengawasan Perijinan Industri dan	<i>Jumlah pelaku usaha yang ijin</i>			11500 pelaku	12509 pelaku	108.77 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SIUP	<i>usahanya diawasi</i>			usaha	usaha				
1.1.2.10.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	<i>Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan</i>			60000 berkas	94367 berkas	157.28 %	-	-	-
1.1.2.10.03.0007	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	<i>Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau</i>			2 kali	2 kali	100.00 %	-	-	-
1.1.2.10.03.0008	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	<i>Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan</i>			4 kali	4 kali	100.00 %	-	-	-
2	Penunjang Urusan Pemerintahan									
2.2	Unsur Manajemen									
2.2.2	Non Pelayanan Dasar									
2.2.2.01	Sarana dan Prasarana Perkantoran									
2.2.2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		<i>Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran</i>	-	87.00%	87.00%	88.12%	101.29%	88.00%	-	-
2.2.2.01.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran</i>			100 %	100 %	100.00 %	-	-	-
2.2.2.01.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan									
		<i>Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran</i>	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
		<i>Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik</i>	-	100.00%	100.00%	99.93%	99.93%	100.00%	-	-
2.2.2.01.02.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	<i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran</i>			100 %	100 %	100.00 %	-	-	-

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat kita gambarkan kinerjanya adalah terkait Indikator Kinerja Kunci sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standard pelayanan minimal, hal tersebut tertuang didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- i. Pendidikan;
- ii. Kesehatan;
- iii. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- iv. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- v. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- vi. Sosial.

Analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pencapaian sasaran yang telah di tetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Pada pembahasan sub bab ini perlu di sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, berikut Tabel T-C 30

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURABAYA

No.	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)													
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			20 ijin	21 ijin	22 ijin	22 ijin		59 Proyek	44 Proyek	121 Proyek	47 Proyek		
									Rp. 3.798.072.500.000	Rp. 3.972.132.680.000	Rp. 4.740.232.462.443			
	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi						5%		Rp. 3.798.072.500.000	Rp. 3.972.132.680.000	Rp. 4.740.232.462.443	Rp. 19.219.900.015.700 (379 proyek)		
	Nilai Realisasi Investasi							Rp. 63.637.817.362.390					Rp. 64.081.289.710.388,70	

No.	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13
	Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi				73%	73,50%	74%			79,68%	86,29%	80,05%		
	Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif												97,33%	

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang bersumber dari internal

- Jaringan trouble pada saat jam pelayanan.
- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengendalian Penanaman Modal dan Pengawasan Industri.

Hambatan bersumber dari eksternal

- Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dan Sistem Elektronik Perijinan melalui OSS RBA.
- Belum optimalnya sistem Perijinan Berusaha Berbasis Resiko sehingga menyebabkan kendala dalam proses pengurusan perijinan berusaha di daerah
- Infrastruktur dan sarana penunjang transportasi masih dirasa kurang oleh para pelaku usaha disektor logistic, untuk memutus panjangnya rantai pasok agar terjadi efisiensi cost.
- Kurang tepatnya waktu dari pelaku usaha/penanam modal dalam memberikan data kegiatan yang dilakukan terkait kegiatan investasi.
- Masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti mengenai kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yaitu proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil review yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa ada perubahan nama kegiatan, indikator kegiatan dan perubahan anggaran (kenaikan/penurunan pagu indikatif). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%	12,454,447,272	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	5 kali	14,213,756,342	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		
								Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100 %		
								Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87 %		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,271,579,880	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	12,271,579,880	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	12,271,579,880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	12,271,579,880	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	5 Kali	22,576,529	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Surabaya	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	5 Kali	22,576,529	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %	1,919,599,933	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	100 %	177,992,050	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	1,741,607,883	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182,867,392						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	182,867,392						
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75,00%	23,296,619						
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				23,296,619						
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Surabaya	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	5 kali	23,296,619						
3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan penanaman modal	42,00%	858,889,102	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor PMA/PMDN	26 Perusahaan	891,180,095	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			yang menyusun dan membuat LKPM								
			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42,00%							
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				326,462,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Penanam Modal yang merealisasikan investasinya	8 perusahaan	583,534,102	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah fasilitas penanaman modal yang dilaksanakan	25 Kegiatan	326,462,000						
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	11 perusahaan	583,534,102	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				532,427,102	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Kesesuaian Ijin Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	70 %	307,645,993	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal	4 dokumen	532,427,102	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya	4 Dokumen	307,645,993	
4						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75 %	11,859,786	
						Penyusunan, Penerapan		Jumlah pelaksanaan	2 Kali	11,859,786	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		pengumpulan informasi hasil tembakau			
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 Kali	11,859,786	
5						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75 %	8,297,956	
						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 Kali	8,297,956	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kota Surabaya	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 Kali	8,297,956	
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88,00 %	1,683,202,349						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1,683,202,349						
	Pengelolaan Pengadaan	Kantor Dinas	Persentase	100 %	1,683,202,349						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Barang dan Jasa	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ketersediaan barang dan jasa perkantoran								
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24,00%	534,650,666	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	50 %	634,453,179	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				534,650,666	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	200 Calon Investor / Investor	634,453,179	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Jawa serta luar Jawa	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	534,650,666	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	634,453,179	
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75,00%	3,781,811,018	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	4,645,513,037	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80,00%				Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75 %		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				3,781,811,018	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60000 berkas	4,645,513,037	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Kantor pelayanan perizinan terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang	60000 berkas	3,765,425,253	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang	60000 berkas	3,820,623,205	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		dihasilkan			Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpadu Satu Pintu	dihasilkan			
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 kali	16,385,765	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11.000 Pelaku Usaha	824,889,832	
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75,00%	11,772,125						
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				11,772,125						
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 kali	11,772,125						
10	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75,00%	1,509,492,751	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	42 %	124,617,508	
			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42,00%							
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1,509,492,751	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah proyek yang menyampikan LKPM	31 proyek	124,617,508	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal	40 proyek	1,741,420	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	3500 perusahaan	654,737,237	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	182 peserta	120,966,373	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 pelaku usaha	854,755,514	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal	12 proyek	1,909,715	
11	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42,00%	390,403,592	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase lembaga yang memanfaatkan data investasi dan penanaman modal	80 %	296,102,584	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				390,403,592	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Laporan kinerja penanaman modal	2 laporan	296,102,584	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya	Jumlah data investasi yang dikelola	45151 data	390,403,592	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah data investasi yang dikelola	46054 data	296,102,584	
TOTAL					21,247,965,494	TOTAL				20,825,780,487	

II.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa terhadap rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2021 telah diadakan Forum Perangkat Daerah dengan mengundang stakeholder terkait yang diselenggarakan, pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 17 Juni 2021

Pukul : 10.00 – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Damarwulan Gedung Gedung ex siola lt. 3
Jl. Tunjungan 1 -3, Surabaya.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021, maka para peserta Forum Perangkat Daerah menyepakati :

1. Program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kota.
2. Rencana Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Program dan sub Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Pada Rencana Kerja Tahun 2022 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Prioritas Program dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2022

PROGRAM PRIORITAS	SUB KEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Informasi dan Informasi Publik	Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

PROGRAM PRIORITAS	SUB KEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Visi

“Peningkatan investasi dengan pelayanan perizinan yang prima dan informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi”

Misi

- a. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
- b. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yaitu:

- a. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang efektif dan inovatif

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yaitu:

- a. Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN
- b. Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026.

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan mengacu pada :

- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026 Kota Surabaya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kota Surabaya yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022 - 2026, maka tema visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kota Surabaya

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
GOTONG ROYONG MENUJU SURABAYA KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	dan jasa antarpulau serta internasional	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
		Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi
		Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
	Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

Dari 5 Misi pembangunan Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan Misi 1 dan 4 dengan tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Misi 1**

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

Tujuan :

Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan

Sasaran :

Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN

- **Misi 4**

Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Sasaran :

- Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2022 menjalankan mandat 8 Program dan 15 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.825.780.487, adapun program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.213.756.342,-

Program tersebut diatas didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan JAsa Pelayanan Umum Kantor
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 891.180.095,-

Program tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 634.453.179,-

Program tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.645.513.037

Program tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.617.508,-

Program tersebut diatas didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 296.102.584,-

Program tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.772.125,-

Program tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.297.956,-

Program tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan sebagai secara detail pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan		5 kali	Rp 14.213.756.34 ₂			5 kali	Rp 14.726.802.0 ₇₇
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100 %				100 %	
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN		100 %				100 %	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		87 %				87 %	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	Rp 12.271.579.880			100 %	Rp 12.578.369.377
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	Kota Surabaya	5 Kali	Rp 22.576.529			5 Kali	Rp 23.216.615
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	Rp 177.992.050			100 %	Rp 178.863.893
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	Rp 1.741.607.883			100 %	Rp 1.946.352.192
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN		26 Perusahaan	Rp 891.180.095			26 Perusahaan	Rp 1.546.725.484
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.02.2.01.02	Evaluasi	Jumlah Fasilitasi	Kantor Dinas	11 perusahaan	Rp 583.534.102			11 perusahaan	Rp 940.165.115

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penanaman Modal	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
2.18.02.2.02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Dokumen	Rp 307.645.993		4 Dokumen	Rp 606.560.369
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi		50 %	Rp 634.453.179		50 %	Rp 724.990.077
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
2.18.03.2.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 Pameran	Rp 634.453.179		3 Pameran	Rp 724.990.077
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal		100 %	Rp 4.645.513.037		100 %	Rp 5.580.881.349
			Persentase industri/perusahaan yang dibina dan		75 %			75 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		diawasi perizinan dan pelaporannya							
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60000 berkas	Rp 3.820.623.205			60000 berkas	Rp 4.646.610.563
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	Kota Surabaya	11.000 Pelaku Usaha	Rp 824.889.832			11.000 Pelaku Usaha	Rp 934.270.786
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM		42 %	Rp 124.617.508			42 %	Rp 117.828.531
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal	Kota Surabaya	40 proyek	Rp 1.741.420		40 proyek	Rp 1.793.648
2.18.05.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	Kota Surabaya	182 peserta	Rp 120.966.373		182 peserta	Rp 114.068.226
2.18.05.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 proyek	Rp 1.909.715		12 proyek	Rp 1.966.657
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase lembaga yang memanfaatkan data investasi dan penanaman modal		80 %	Rp 296.102.584		80 %	Rp 369.542.562
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2.18.06.2.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah data investasi yang dikelola	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46054 data	Rp 296.102.584		46054 data	Rp 369.542.562

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya		75 %	Rp 11.859.786			75 %	Rp 11.949.768
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	Kota Surabaya	2 Kali	Rp 11.859.786			2 Kali	Rp 11.949.768
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya		75 %	Rp 8.297.956			75 %	Rp 8.384.229
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)								
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	Kota Surabaya	2 Kali	Rp 8.297.956			2 Kali	Rp 8.384.229
TOTAL						Rp 20.825.780.487			Rp 23.087.104.077

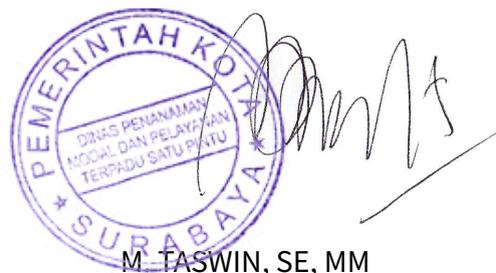
BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Kota Surabaya

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Investment and One-Stop Service of the City of Surabaya. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SURABAYA' around the perimeter and 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

M. TASWIN, SE, MM
196203181990031003